



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Laporan Kinerja 2023



KPKNL JAKARTA IV



Daftar Isi

KATA PENGANTAR - i
RINGKASAN EKSEKUTIF - iv

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
KPKNL Jakarta IV - 1
- B. Peran Strategis
KPKNL Jakarta IV - 4
- C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan
dengan Pencapaian Kinerja - 5
- D. Sistematika Laporan - 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis - 7
- B. Penetapan Kinerja - 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi - 17
- B. Realisasi Anggaran - 27

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan Umum - 28
- B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk
Tahun Mendatang - 28

Lampiran

- Kontrak Kinerja Kepala
KPKNL Jakarta IV Tahun 2023

PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor ND-4493/KN.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPKNL Jakarta IV pada Tahun 2023.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Score Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Jakarta IV dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2023. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV Tahun 2023 sebesar **110,75%**. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Jakarta IV sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2023.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2023 ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Jakarta IV. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus menuju kesempurnaan. Dengan semangat kerja cerdas dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat kita selesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Jakarta IV yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala KPKNL Jakarta IV,



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jakarta IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta IV mempunyai fungsi: (1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (5) pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) pelaksanaan pelayanan lelang; (7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; (9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (10) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; (11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (14) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN untuk tahun 2020-2024 adalah **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi DJKN, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV adalah sejalan dan menyesuaikan dengan tujuan DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap IKU yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta IV. Sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2023, telah ditetapkan **10 (sepuluh)** sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2023.

Sasaran strategis satu yaitu sasaran strategis **Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan** yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: **(1)** Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp123.060.418.027 dengan persentase 100%. IKU ini berasal dari penerimaan PNPB dari Pengelolaan BMN, PNPB dari Piutang Negara dan PNPB Lelang. Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dengan realisasi IKU tahun 2022 adalah sebesar 120%. **(2)** Persentase produktivitas lelang dengan target untuk tahun 2023 adalah sebesar 80%, pada tahun 2022 tingkat realisasi persentase produktivitas lelang adalah sebesar 120%. **(3)** Indeks Integritas dengan target pada tahun 2023 adalah sebesar 88,67.

Sasaran strategis dua yaitu **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**. Terdapat 3 (tiga) IKU yaitu **(1)** Persentase realisasi pokok lelang dengan target untuk tahun 2023 sebesar 100%, atau dengan nilai Rp2.435.000.000.000,00 sedangkan realisasi dari tahun 2022 sebesar 120%. **(2)** Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan target untuk tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan nilai Rp250.500.000.000,00, pada tahun 2022, tingkat realisasi outstanding piutang negara sebesar 120%. **(3)** Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction tahun 2023 dengan target sebesar 94% dari total pelaksanaan lelang. Realisasi di tahun 2022 mencapai 100% dari target sebesar 108,7%.

Sasaran strategis tiga yaitu **Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi** terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Adapun realisasi IKU tahun 2022 sebesar 4,77 (skala 5) dari target 4,75. Sedangkan target untuk tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran strategis empat yaitu **Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal** yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu **(1)** Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan dengan target IKU pada tahun 2023 adalah 100% atau sebanyak 75 bidang tanah, sedangkan realisasi IKU ini pada tahun 2022 adalah 120% atau sebanyak 180 bidang tanah BMN. **(2)** Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan realisasi di tahun 2022 mencapai 100,75% dari target 806 BKPN, sedang target di tahun 2023 sebesar 100% atau dengan nilai 850 BKPN. **(3)** Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan Jumlah Aset yang Dievaluasi Kinerja dan Disampaikan Rekomendasinya sebanyak 51 dan Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Satker 5. Di tahun 2022, realisasi IKU ini adalah 120%.

Sasaran strategis lima yaitu **Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dengan target di tahun 2023 sebesar 25%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 0,04% dari target sebesar 19%. **(2)** Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien dengan target di tahun 2023 sebesar 70.

Sasaran strategis enam yaitu **Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**. Terdapat 1 (satu) IKU pada sasaran strategis ini yaitu Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan target di tahun 2023 adalah sebesar 86% dari total pelaksanaan lelang. Realisasi di tahun 2022 mencapai 113,81% dari target sebesar 85%.

Sasaran strategis tujuh yaitu **Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang yang Efektif**. Terdapat 1 (satu) IKU pada sasaran strategis ini yaitu Deviasi Data PNBPFungsional DJKN dengan target di tahun 2023 sebesar 15%, IKU ini di tahun 2022 mencapai realisasi 0,0% dari target 10%.

Sasaran strategis delapan adalah **Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**. Pada Tahun 2023, sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu: **(1)** Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko dengan target tahun 2023 sebesar 80. **(2)** Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP) dengan target tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran strategis sembilan adalah **Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal**, terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun 2022 realisasi sebesar 97,36% dari target 95,5% sedangkan target tahun 2023 sebesar 100%,

Sasaran strategis sepuluh adalah **Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif**, terdapat 2 (dua) IKU di dalamnya yaitu: **(1)** Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBBM dengan target di tahun 2023 sebesar 80. **(2)** Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan target tahun 2023 sebesar 90.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta IV didukung oleh sumber daya manusia dalam berbagai bidang dan keahlian. Jumlah pegawai KPKNL Jakarta IV pada 31 Desember 2023 adalah sebanyak 41 pegawai dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	-	-	-	-	0
3.	SLTA	-	-	2	-	2
4.	DI/DII	-	1	1	-	2
5.	DIII	-	2	5	-	7
6.	DIV/Sarjana	-	4	18	-	22
7.	Pasca Sarjana/Master	-	-	4	4	8
8.	Doktor/S3	-	-	-	-	0
TOTAL		0	7	30	4	41

II. Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	6	2	0	8
31-40	0	1	14	0	15
41-50	0	0	9	3	12
dias 50	0	0	5	1	6
Jumlah	0	7	30	4	41

III. Tenaga Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Juru Sita	4
2.	Pemeriksa	2
3.	Pranata Keuangan APBN	1
4.	Pelelang (Jabfung)	6
5.	Penilai Kekayaan Negara	2
6.	Penilai (Jabfung)	5
7.	Pejabat Lelang	3
TOTAL		31

B. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta IV memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Jakarta IV turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta IV selaku *asset manager* yang efektif dan produktif mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara, setelah itu dilakukan inventarisasi menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang berasal dari BLU dan instansi pemerintah.

d. Pelayanan Lelang

Berlakunya PMK Nomor 122 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu

putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penawaran lelang melalui elektronik (*email*) dan internet (*e-auction*) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. *E-auction* dapat dilaksanakan untuk semua jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. *E-auction* merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui *browser* pada alamat www.lelang.go.id. Selain dengan komputer atau laptop, aplikasi juga dapat diakses melalui telepon pintar berbasis android. Dengan penggunaan media internet, peserta lelang dapat mengikuti lelang internet dari dan dimanapun berada serta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meski semua sasaran strategis mencapai target, namun terdapat beberapa persoalan/permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pemerintah mengakibatkan kegiatan survey asset yang masuk target portofolio aset belum bisa dilaksanakan 100%;
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada satuan kerja terkait pengisian form pendataan portofolio aset untuk meminimalisir kesalahan pada saat pengisian form pendataan;
3. Peningkatan pemahaman pada satuan kerja untuk melakukan penginputan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset;
4. Beberapa Debitur tidak ditemukan keberadaannya sehingga menjadi kendala dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu;

5. Terdapat aset kredit yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas rendah dan nilai jaminan tidak mencukupi untuk menjamin hutang, aset kredit yang memiliki permasalahan hukum, dan aset yang dokumennya kurang lengkap, sehingga sulit untuk dicapai *recovery*-nya;
6. Daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena bencana *Covid-19*;
7. Persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang dapat menghasilkan harga yang optimal belum merata di seluruh lapisan masyarakat serta masih banyak gugatan/perlawanan/keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, fidusia dan kepailitan sebagai penyelesaian dari kredit macet.

D. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV sebagaimana yang ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV selama tahun 2023 yang akan kami uraikan dalam Bab III Laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Jakarta IV di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstra 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Untuk melaksanakan hal tersebut, ditetapkan juga Keputusan Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor KEP-263/WKN.07/KNL.04/2020 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun 2020-2024. Visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan tersebut, KPKNL Jakarta IV telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai KPKNL Jakarta IV, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberi manfaat ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai Tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta IV melaksanakan program yaitu:

- Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan BMN dan lelang kepada seluruh Satuan Kerja binaan KPKNL Jakarta IV;
- Melaksanakan e-rekon dengan satuan kerja terkait rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara sistem;
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman/persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- Apel Pagi, yang dilaksanakan secara periodik untuk pegawai KPKNL Jakarta IV;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta IV untuk mengikuti diklat teknis maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- Membuat berbagai sistem aplikasi guna memudahkan tugas dan meningkatkan kinerja pegawai di KPKNL Jakarta IV.

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta IV dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2023 termasuk **19 IKU**. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama, dan realisasi tahun sebelumnya, serta target 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 PENINGKATAN KONTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	120%	100%
2. Persentase produktivitas lelang	%	120%	80%
3. Indeks Integritas	Indeks	N/A	88,67
SASARAN STRATEGIS 2 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	181,07%	100%
2. Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	%	193,33%	100%
3. Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	%	108,7%	94%

SASARAN STRATEGIS 3 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	%	4,77 (Skala 5)	100%
SASARAN STRATEGIS 4 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan (Sesuai Target Kriteria)	%	260,87%	100%
2. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100,75%	100%
3. Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	157%	100%
SASARAN STRATEGIS 5 PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	0,04%	25%
2. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian uang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien	Indeks	N/A	70
SASARAN STRATEGIS 6 PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	%	113,81%	86%
SASARAN STRATEGIS 7 PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	0,0%	15%
SASARAN STRATEGIS 8 PENGUATAN TATA KELOLA DAN BUDAYA KERJA KEMENKEU SATU DALAM EKOSISTEM KOLABORATIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Indeks	97,68	80
2. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	%	N/A	100%

SASARAN STRATEGIS 9 PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	101,95%	100
SASARAN STRATEGIS 10 PENGUATAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INTERNAL YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023
1. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBBM	Indeks	N/A	100
2. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Indeks	N/A	60

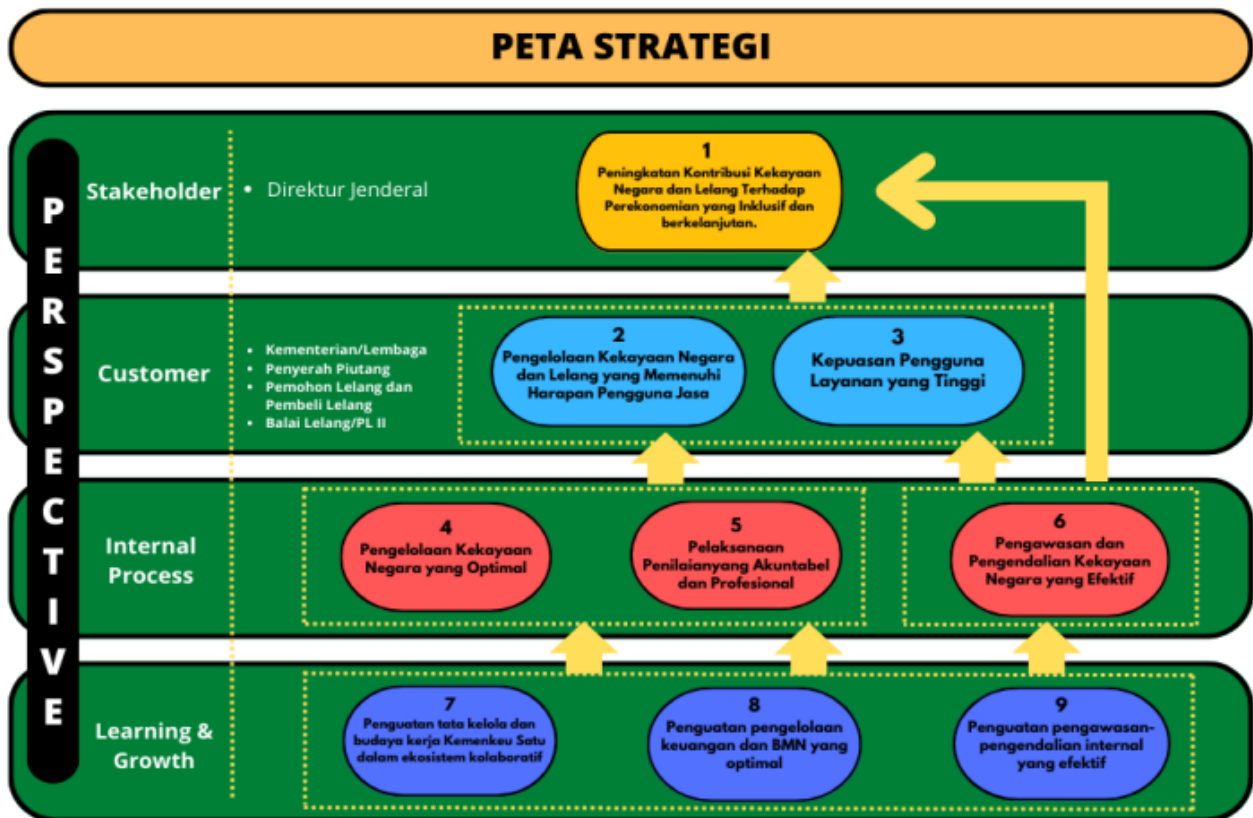
Ket:

* N/A = tidak tersedia, penjelasan akan disajikan dalam uraian sasaran strategis

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2023 sebagai berikut:



Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2023 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran strategis peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian terdapat **3 (tiga) IKU** yaitu: (1) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang; (2) Persentase Produktivitas Lelang; dan (3) Indeks Integritas.

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga, penerimaan Biaya Administrasi dari pengurusan Piutang Negara dan penerimaan bea lelang ataupun hasil lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV. IKU ini pada tahun 2023 ditargetkan 100% atau sebesar Rp123.060.418.027,00.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa terdapat **3 (tiga) IKU** yaitu: (1) Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan (2) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara; dan (3) Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*.

IKU Persentase realisasi pokok lelang dengan target sebesar Rp2.435.000.000.000 meliputi 2 komponen perhitungan yaitu: Target/Realisasi pokok lelang kelas I dengan target tahun 2023 sebesar Rp2.335.000.000.000 dan komponen lainnya yaitu target/realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan persentase realisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang secara optimal ditujukan untuk pengembalian (*recovery*) piutang negara yang tinggi ke negara dan pelaksanaan lelang yang mendorong terjualnya barang yang dilelang dengan harga yang tinggi. Pelayanan yang optimal akan berdampak pada sisi penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang dari proses pelayanan lelang.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Hasil dari pengurusan piutang negara antara lain berupa Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan target tahun 2023 sebesar 92% dari realisasi lelang tahun 2023. Sedang persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN, memiliki target tahun 2023 sebesar 10%.

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi terdapat **1 (satu) IKU** yaitu: Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL. Adapun target IKU tahun 2023 sebesar 100%.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Semakin baik pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal terdapat **3 (tiga) IKU** yaitu: (1) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan; (2) Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara; dan (3) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa tanah, dengan pembagian tugas/kewajibannya masing-masing. Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertipikat dan belum bersertipikat, identifikasi dengan memetakan tanah belum bersertipikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik, penyusunan data BMN belum bersertipikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan, K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertipikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan, penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertipikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan, dan pelaksanaan sertipikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Pada tahun 2023, target bidang tanah yang disertipikatkan berjumlah 75.

Persentase efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dihitung dari jumlah BKPN yang lunas, ditarik, PSBDT, dikembalikan. Target BKPN Selesai pada tahun 2023 dengan persentase 100% dari target 850 BKPN.

Portofolio Aset adalah evaluasi kinerja BMN yang merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Capaian portofolio aset diperoleh dari Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya/jumlah target aset yang akan di evaluasi. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan target pada tahun 2023 sebesar 100%.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran strategis pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional **terdapat 2 (dua) IKU** yaitu: (1) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian; dan (2) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif dan Efisien.

Realisasi ini adalah rata-rata deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2023. Deviasi terjadi karena nilai yang digunakan dalam persetujuan lebih besar dari hasil penilaian. Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target pada tahun 2023 lebih kecil dari 25%.

Realisasi ini adalah rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang *agile*, efektif dan efisien pada tahun 2023. Persentase rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang *agile*, efektif dan efisien dengan target pada tahun 2023 lebih besar dari 70.

6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Sasaran strategis Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif terdapat **1 (satu) IKU** yaitu: (1) Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan target sebanyak 86% di tahun 2023

7. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang yang Efektif

Sasaran strategis edukasi yang efektif terdapat **1 (satu) IKU** yaitu: Deviasi Data PNBPFungsional DJKN, dengan target tahun 2023 sebesar 15%.

8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Sasaran strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif terdapat **2 (dua) IKU** yaitu: (1) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko; dengan target ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 80, dan (2) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP) dengan target ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 100%.

9. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Sasaran strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal terdapat **1 (satu) IKU** yaitu: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Anggaran adalah salah satu sumber daya dalam organisasi. Pengelolaan anggaran yang optimal adalah penggunaan anggaran untuk mendorong organisasi mencapai hasil kinerja yang maksimal. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target tahun 2023 sebesar 100%

10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal

Sasaran strategis Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal terdapat **2 (dua) IKU** yaitu: (1) Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBBM; (2) Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.

Pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan telah ditegaskan kembali pada Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024 dan Renstra

DJKN 2020-2024. Sebelumnya KPKNL Jakarta IV telah meraih predikat ZI-WBK pada tahun 2019. Targetnya, pada tahun 2023 KPKNL Jakarta IV mampu meraih predikat ZI-WBBM dengan capaian minimum sebesar nilai 100.

Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan target 90 pada tahun 2023.

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, terhadap 19 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Tahun 2023 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV sebesar 110,75%.

Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Jakarta IV Tahun 2023 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.1	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	113,98%	113,98%
		1.2	Persentase produktivitas lelang	80%	105%	120%
		1.3	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
SS 2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	98,41%	98,41%
		2.2	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	124,26%	120%
		2.3	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%	99,71%	106,07%
SS 3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,4%	106,4%

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	4.1	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	120%	120%
		4.2	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKN)	100%	104%	104%
		4.3	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120,71%	120%
SS 5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5.1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0%	120%
		5.2	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien	70	96,04	120%
SS 6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6.1	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	95,48%	111,02%
SS 7	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	7.1	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0%	120%
SS 8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	8.1	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	99,13	120%
		8.2	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%	120%	120%
SS 9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	9.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	99,79	99,97%

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 10	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	10.1	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBBM	100	90	90%
		10.2	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	94	120%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan 3 (tiga) IKU, yaitu:

IKU 1.1: Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan, dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Nilai manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara diperoleh melalui:

1. PNBP Pengelolaan BMN

- a) Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- b) Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

Target PNBP Pengelolaan BMN tahun 2023 sebesar Rp42.560.418.027,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan belas dua puluh tujuh rupiah).

2. PNBP Piutang Negara

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.
- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

Target PNBP Piutang Negara tahun 2023 sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

3. PNBP Lelang

Penerimaan ini berasal dari pelayanan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV kepada pengguna jasa. PNBP lelang terdiri dari:

- a. bea lelang;
- b. bea lelang pegadaian;
- c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- d. biaya permohonan lelang;
- e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. pemberian izin operasional Balai Lelang;
- g. pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
- h. perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II; dan
- i. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Target PNBP Lelang tahun 2023 sebesar Rp66.500.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

**Tabel Realisasi Penerimaan Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023**

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp42.560.418.027,00	Rp51.089.859.793	120%
b. PNBP Piutang Negara	Rp14.000.000.000,00	Rp17.156.848.510	122,55%
c. PNBP Lelang	Rp66.500.000.000,00	Rp72.015.677.409	108,29%
Realisasi IKU	Rp123.060.418.027	Rp140.262.385.712	113,98%

Realisasi IKU Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara tercapai 113,98% dari target yang ditetapkan.

IKU 1.2: Persentase Produktivitas Lelang

Realisasi persentase produktivitas *e-lelang* yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 105% dari target yang ditetapkan sebanyak 80%, atau pencapaian target sebesar 120% dari frekuensi lelang yang dilakukan di tahun 2023.

IKU 1.3: Indeks Integritas

Realisasi Indeks Integritas Organisasi yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 89,17 dari target yang ditetapkan sebanyak 88,67, atau pencapaian target sebesar 100,56%.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 2.1: Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi persentase hasil lelang (pokok lelang) pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2023 adalah 98,41% dari target sebesar 100%, dengan rincian capaian sebagai berikut.

Pokok Lelang	Target 2022	Realisasi	Capaian
PL Kelas I	Rp2.335.000.000.000	Rp2.191.510.976.210	
Pegadaian	Rp100.000.000.000	Rp204.666.379.600	
Jumlah	Rp2.435.000.000.000	Rp2.396.177.355.810	98,41%

IKU 2.2 : Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Realisasi Tingkat *Outstanding* Piutang Negara pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2023 adalah 124,26% dari target sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Saldo PNDS	Rp250.500.000.000	Rp311.279.554.943	124,26 %

IKU 2.3: Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

Realisasi pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dicapai pada tahun 2023 sebesar 99,71% dari target yang ditetapkan sebanyak 94%. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Persentase Produktifitas Lelang
Per 31 Desember 2023**

Jenis Lelang	Frekuensi	Jumlah Frekuensi	%
<i>e-Auction</i>	583	583	100%
<i>e-Conventional Auction</i>	0	0	0%
Konvensional	2	2	2
Jumlah			99,71%

3. Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 3.1: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Realisasi survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Jakarta IV tahun 2023 ditetapkan sebesar 106,4% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Pencapaian target sebesar 106,4%.

Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Komponen 1)	100%	104%
<i>Target/Capaian IKPL</i>	5	4,43
Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL DJKN	100%	125
<i>Jumlah Rekomendasi yang harus Ditindaklanjuti</i>	11	11
% Realisasi/ Target Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan		106,4%

4. Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 4.1: Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan BMN.

Tujuan pensertipikatan BMN antara lain untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan mengamankan BMN berupa tanah. Ruang lingkup pensertipikatan BMN berupa tanah meliputi: tanah yang belum bersertipikat ataupun tanah yang sudah bersertipikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/lembaga.

Realisasi persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Terdapat target 75 bidang tanah BMN yang disertipikatkan di 2023, dan realisasi di akhir 2023 adalah sebanyak 90 bidang tanah BMN yang selesai disertipikatkan.

IKU 4.2: Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 104% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Pencapaian sampai 31 Desember 2023 yang tercatat adalah sejumlah 884 BKPN yang selesai diproses, dari target yang ditetapkan sebanyak 850 BKPN.

IKU 4.3: Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 157% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Rincian dari implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Evaluasi Kinerja BMN	Target 2023	Realisasi	Capaian
Jumlah Aset yang Dievaluasi Kinerja dan Disampaikan Rekomendasinya	51	54	120,71%
Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Satker	5	9	

5. Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 5.1: Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebanyak 25%. Pencapaian target adalah sebesar 120%.

IKU 5.2: Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Realisasi rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang *agile*, efektif dan efisien yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 96,04 dari target yang ditetapkan sebanyak 70. Pencapaian target adalah sebesar 120%.

6. Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 6.1: Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Realisasi tingkat efektifitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara dicapai pada tahun 2023 sebesar 95,48% dari target yang ditetapkan sebanyak 86%. Pencapaian target adalah sebesar 111,02%. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Tingkat Efektifitas
Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
Per 31 Desember 2023**

Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah
<i>Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN</i>	88
<i>Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN</i>	81
<i>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022</i>	90
<i>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023</i>	87
<i>% Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara periode Semester II 2022 sd Semester I 2023</i>	95,48%

7. Sasaran Strategis 7: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang yang Efektif dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 7.1: Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Realisasi Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 15%. Pencapaian target sebesar 120%.

8. Sasaran Strategis 8: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 8.1: Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Realisasi Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 99,13 dari target yang ditetapkan sebanyak 80. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Target	Realisasi
Indeks Pengelolaan Kinerja	80	98
Indeks Kualitas Manajemen Risiko	80	100
Nilai Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	99,13
Capaian IKU		120%

IKU 8.2: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)

Realisasi persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP) yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria	38
Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria	38
% Capaian Utama	100%
% Capaian Tambahan	100%
% Capaian Pengembangan Kompetensi Pegawai	120%
Capaian IKU	120%

9. Sasaran Strategis 9: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 9.1: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 99,79%, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 100% atau tercapai 99,79%.

2. Sasaran Strategis 10: Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 10.1: Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBBM

Realisasi Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBBM yang dicapai pada tahun 2023 hanya sebesar 90 dari target yang ditetapkan sebanyak 100. Pencapaian target sebesar 90%.

IKU 10.2: Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Realisasi Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 99,00 dari target yang ditetapkan sebanyak 90. Pencapaian target sebesar 110%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dalam Tahun 2023 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan jumlah sebesar Rp2.135.186.000.00 tersebut pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.822.192.875.00 atau sebesar 85,34% dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja
Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2023**

No	Program	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja pegawai	0	0	100
2.	Belanja Barang	2.046.321.000	1.737.292.875	84,90
3.	Belanja Modal	88.865.000	84.900.000	95,54
Jumlah		2.135.186.000	1.822.192.875	85,34

Pada tahun 2023 ini, perhitungan persentase penyerapan anggaran sama dengan tahun 2023. Perhitungan realisasi IKU terdiri dari komponen persentase penyerapan anggaran, persentase keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase IKU} = (\text{IKPA} \times 50\%) + (\text{SMART DJA} \times 50\%)$$

**Tabel IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2023**

No	Indikator IKPA	Bobot	Nilai	Capaian
A. Nilai IKPA				93,76%
1.	Pengelolaan UP	10	10	
2.	Hal III DIPA	10	7,94	
3.	Revisi DIPA	20	17,07	
4.	Konfirmasi Capaian Output	10	10	
5.	Realisasi	25	25	
6.	Dispensasi SPM	5	5	
Total		75,01	80	
B. Nilai SMART				96,89%
Capaian Tahun 2023				95,325 %

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2023 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta IV sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Jakarta IV telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Jakarta IV senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. **Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2023 yang memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta IV mencapai 110,75%.**

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta IV mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV. Laporan Kinerja tahun 2023 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Jakarta IV pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV,
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023
NOMOR: PR-04/WKN.07/2023

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

31 Januari 2023
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik
Karman



DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV,
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	RE#1 Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN	13	6
		RE#2 Adanya BMN yang telah dilakukan perjanjian Pemanfaatan BMN tetapi belum mendapat persetujuan dari pengelola barang	10	5
		RE#3 Penurunan intensitas frekuensi lelang laku	9	8
		RE#4 Penanggung Utang Tidak Melakukan Pembayaran	2	1
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	RE#5 Adanya pembeli lelang wanprestasi	11	6
		RE#6 Adanya pembatalan lelang	8	2
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	RE#7 Penyelesaian permohonan pemanfaatan BMN melewati norma waktu SOP Integrasi	11	6
		RE#8 Objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang	5	1
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	RE#9 Penggunaan rumah negara yang tidak sesuai dengan ketentuan	18	11
		RE#10 Terdapat permasalahan hukum pada bidang tanah yang akan disertifikatkan	15	10
		RE#11 Produk penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diterbitkan	13	6
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan	RE#12 Hasil penilaian tidak digunakan oleh pemohon penilaian sebagai dasar persetujuan	8	5



	Profesional	RE#1 3	Nilai wajar hasil penilaian dalam rangka pengelolaan BMN tidak akurat	8	6
		RE#1 4	Pelaksanaan penilaian yang tidak sesuai kewenangan	10	5
		RE#1 5	Manipulasi Nilai Wajar sehingga tidak sesuai dengan pasar	10	5
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	RE#1 6	Satuan kerja tidak menyampaikan laporan wasdal	11	6
7.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	RE#1 7	Pegawai tidak memenuhi jam latihan (jamlat) pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan	5	3
		RE#1 8	Tidak lengkapnya dokumen pengelolaan kinerja	2	1
8.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	RE#1 9	Target output tidak tercapai sesuai dengan trajectory triwulanan	16	11
		RE#2 0	Rendahnya efisiensi anggaran	16	11
		RE#2 1	Keterlambatan penyampaian laporan BMN dan RKBMN	1	1
9.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	RE#2 2	Tidak Terpenuhinya Nilai yang Dipersyaratkan untuk Memperoleh Predikat ZI WBK/WBBM	14	6

31 Januari 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik
Karman





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.07/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		2c-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		2d-N Deviasi Data PNBPN Fungsional	15%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
4	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	4a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4c-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		5b-N Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5%)



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-CP Indeks Integritas	88,67
		9b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		9c-N Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK/WBBM	100 (100%)
		9d-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	Rp	5.520.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp	303.801.000,00
3. Legislasi dan Litigasi	Rp	33.500.000,00
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.498.984.000,00
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	4.400.000,00
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	6.720.000,00

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik
Aloysius Yanis Dhaniarto



Ditandatangani Secara Elektronik
Karman



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2c-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
2d-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
4	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
7a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
9a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
9b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
9c-N	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100 (100%)	100 (100%)
9d-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Jakarta IV,



Ditandatangani Secara Elektronik
Karman





-  [kpknl.jakarta4](https://www.instagram.com/kpknl.jakarta4)
-  [KPKNLJakartaIV](https://www.facebook.com/KPKNLJakartaIV)
-  [KPKNLJakarta4](https://twitter.com/KPKNLJakarta4)
-  [0815 8684 8888](https://wa.me/081586848888)
-  [kpknl.jakarta4](https://www.youtube.com/kpknl.jakarta4)
-  kpknljakarta4@kemenkeu.go.id
-  www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta4

Akses Cepat Layanan
KPKNL Jakarta IV



KPKNL